

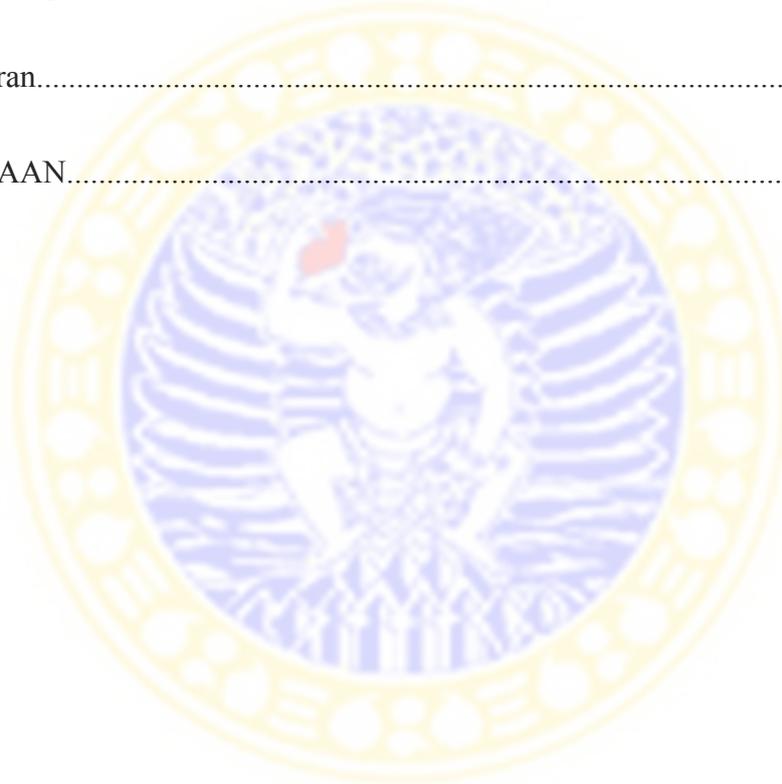
DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
I.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
I.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
I.4. Kajian teoritik.....	7
I.5. Metode Penelitian.....	22
I.6. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II. HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA KORPORASI PADA TPPU.....	27
II.1. Perseroan terbatas sebagai badan hukum lahir melalui proses hukum.....	27
II.1.1. Perseroan sebagai subyek hukum berbadan hukum.....	27
II.1.2. Pendirian dan modal PT.....	31
II.2. Tindak pidana pencucian uang menurut UU PPTPPU.....	42
II.3. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut UUPT 2007 dan UU PPTPPU.....	47
II.3.1. Tidak ada pidana terhadap korporasi dalam UUPT 2007.....	47
II.3.2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPTPPU	50
BAB III. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS KEPADA KREDITUR	
PERSEROAN.....	58
III.1. Prinsip-prinsip dalam UUPT.....	58
III.1.1. Piercing The Corporate Veil (Penembusan Atas Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham).....	58
III.1.2. Fiduciary Duty.....	60
III.1.3. Perlindungan Saham Minoritas (Personal Right And Derivative Action.....	63

III.1.4. Perlindungan Kreditur (Capital Maintenance Doctrine).....	65
III.1.5. Keterbukaan (Disclousure Transparency).....	67
III.2. Perlindungan hukum terhadap kreditur PT terkait TPPU.....	71
III.2.1. Bentuk-bentuk sanksi bagi korporasi.....	71
BAB IV. PENUTUP.....	78
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran.....	79
DAFTAR BACAAN.....	80



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324).